



**NOTULENSI RAPAT PLENO
HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

Tanggal : 29 Desember 2025
Waktu : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Daring Via Zoom
Acara : Harmonisasi Rancangan Permenpora tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora

Peserta Rapat/Kegiatan : Eksternal:

1. Rizky Arafah – Kementerian Hukum
2. Mohammad Zamroni – Kementerian Hukum
3. Abdurrahman – Kementerian Hukum
4. Anggreita Shaskia – Kementerian Hukum
5. Hesty Puspa Ningrum - Kementerian PANRB
6. Defantra Ramadhan – Dayalima
7. Albert Julio – Dayalima

Internal:

1. Dr. Gunawan Suswanto - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Dr. Yohan, M.Si. – Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan
3. Hasintya Saraswati – Staf Khusus Kebijakan dan Kerjasama Strategis
4. Yayat Suyatna – Kepala Biro SDMO
5. Esa Sukmawijaya – Asisten Deputi
6. Imam Gunawan - Analis Kebijakan Ahli Utama
7. Muhamad Erpasoleh - Pranata SDM Aparatur

NOTULENSI RAPAT:

1. Perubahan SOTK merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar administratif. Penataan dilakukan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan tugas dan fungsi, penguatan program prioritas, serta peningkatan akuntabilitas kinerja kementerian.
2. Ditekankan perlunya perumusan tugas dan fungsi setiap unit secara tegas dan terukur agar selaras dengan mandat kementerian serta mendukung pencapaian sasaran strategis. Penajaman nomenklatur dan fungsi dimaksudkan untuk memperjelas peran masing-masing unit dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
3. Penataan SOTK akan menjadi dasar penyesuaian jabatan, penempatan SDM, serta penyelarasan perencanaan kinerja dan penganggaran. Dengan struktur yang lebih proporsional, diharapkan efektivitas pelaksanaan tugas meningkat dan beban kerja lebih seimbang.
4. Tim perumus diminta menyempurnakan redaksional dan perumusan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai masukan forum harmonisasi. Setelah penyempurnaan, rancangan dapat dilanjutkan ke tahapan proses peraturan perundang-undangan berikutnya sesuai ketentuan.
5. Secara prinsip, forum harmonisasi dapat menerima arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Pimpinan Rapat

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Andry Manuella Ginting